

JELASKAN TEMPAT/KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM ILMU HUKUM

YUHELLA CITRA INDOVA

Email: citraindovayuhella@gmail.com

No BP: 1910003600434

UNIVERSITAS EKA SAKTI

A. Pendahuluan

Setelah kami ditugaskan untuk mempelajari Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu hukum Universitas ekasakti, maka kami menyusun Buku Hukum Administrasi Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara .

Buku-buku Hukum Administrasi Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya perubahan pertama sampai perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Administrasi Negara mengalami perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945.

Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa. Kami sadari bahwa buku ini belum sempurna baik isinya maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan kemudian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita semua. Amin.

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara.

Rumusan masalah

1. Jelaskan hukum administrasi Negara dalam hukum public dalam sistematika ilmu hukum!
2. Bagaimana hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya!
3. Jelaskan Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum lainnya!
4. Kenapa Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul?

B. Pembahasan

Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum lainnya.

Dalam sistematika Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum Tata Negara. Dilihat dari sejarahnya sebelum abad 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. Pada pertengahan abad 20 Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya Negara hukum modern (welfarestate) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat dalam teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi seluruh materi hukum itu secara terperiinsi sebagai berikut :

1. Hukum Tata Negara (materiil)
 - a. Pemerintahan
 - b. Peradilan
 - c. Kepolisian
2. Hukum Perdata (materiil)
3. Hukum Pidana (materiil)
 - a. Hukum Pemerintahan
 - b. Hukum Peradilan

- a. Peradilan Tata Negara
- b. Hukum Acara Perdata
- c. Hukum Acara Pidana
- d. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Ilmu Hukum Administrasi Negara Sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri maka harus ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Ilmu Pemerintahan yang akan dibahas di bawah ini :

1. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara dilihat dari segi sejarah bahwa sebelum abad ke 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri.

Mengenai batasan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara ini terdapat dua golongan pendapat yaitu :

A. Bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada perbedaan prinsip, yaitu :

- 1. Oppen Heim
- 2. Van Vallen Hoven
- 3. Romeign
- 4. Donner
- 5. Logemann

a.d.1. Oppen Heim mengatakan bahwa pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust) , dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi

bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah Negara dalam keadaan bergerak (*Staats in beving*) dimana Hukum Administrasi Negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah.

a.d.2. Van Vallen Hoven

Hukum Administrasi Negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata.

Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari Hukum Tata Negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada Hukum Administrasi Negara.

a.d.3. Romeign

Hukum Tata Negara mengatur mengenai dasar-dasar dipad Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan teknisnya.

a.d.4. Donner

Hukum Tata Negara menetapkan tugas, sedangkan Hukum Administrasi Negara melaksanakan tugas itu yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

a.d.5. Logemann

Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negara tentang perhubungan hukum istimewa.

Hukum Tata Negara mempelajari :

1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat
4. Fungsi jabatan-jabatan itu
5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
6. Hubungan antara jabatan-jabatan
7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Letak/ Kedudukan Hukum Administrasi Dalam Lapangan Hukum

Hukum Administrasi materiil terletak diantara Hukum prifat dan Hukum pidana, karena itu disebut juga Hukum antara sifat dan letak Hukum Administrasi yang demikian dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

1. Hukum Konstitusi/ HTN

2. Hukum Perdata Formil	4. Hukum Administrasi Formil	6. Hukum Pidana Formil
3. Hukum Perdata Materiil	5. Hukum Administrasi Materiil	7. Hukum Pidana Materiil

Sebagai perbandingan dapat juga diketengahkan skema tentang pembentukan dan penegakan Hukum materiil/ F.A.M. Stroinkes :

D. Penutup

Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training ground serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat pada pemerintahan pusat.

Sistem pemerintahan daerah juga membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajerial sehingga bisa meningkatkan pengaruh serta pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para elit lokal. Dalam sistem pemerintahan daerah juga bisa memungkinkan para pemimpin daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah - tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah - daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik bila dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari pusat.

Kajian mengenai hubungan pemerintahan mencakup pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Bentuk hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah secara konkret dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan.

Daftar Pustaka

Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3312.

Annisa Arifka, Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.

Ade Sarmini, Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4231.

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3558.

Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Volume 25, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

Debora Angelia Pardosi, Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja

Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3718.

Dewi Fiska Simbolon, Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak, *Soumatera Law Review*, Voume 1, Nomor 1, 2017, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3327.

Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt), *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3557.

Dola Riza, Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.

Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3347.

Ferdian, Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3564.

Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3319.

Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3713.

Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3908.

Jasmir, Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3384.

Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Laurensius Arliman S, Gokma Toni Parlindunga S, Politik Hukum Perlindungan Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Laurensius Arliman S, Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan - Tantangan Warga Negara Milineal Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia

Knowledge in Developing Social Justice), 2017.

Laurensius Arliman S, Debora Angelina Carissa Pardosi, Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye, Seminar

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 2, 2018,
<https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600>.

Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parlindungan S, Cyber Bullying Against Children In Indonesia, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.

Laurensius Arliman S, Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah, Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Volume 5, Padang 18-19 Mei 2017.

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Jurnalica, Volume 16, Nomor 3, 2019.

Laurensius Arliman S, Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 3, 2018.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto, *Lex Jurnalica*, Volume 14, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 14, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 3, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.

Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.

Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2018 <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437>.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5>

Laurensius Arliman S dan Hariyadi, Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>.

Laurensius Arliman S, Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor

2, 2018, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela

Negara, Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi, Volume 5, Nomor 1, 2018,

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.

Laurensius Arliman S, Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep

Pemberlakuannya di Indonesia, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018,

<https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

Laurensius Arliman S, Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,

Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Yustisia,

Volume 22, Nomor 1, 2015.

Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di

Indonesia, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018,

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di

Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di

Indonesia, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2017,

<http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668>.

Laurensius Arliman S, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai

Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19,

Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, Nomor 2, 2015,
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>

Laurensius Arliman S, Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat), Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015,

Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Makin, Kualitas Pelayanan Sdm Mempengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam, Jurnal Marketing, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume 1, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, DOI:
<http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017,
<https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>

Laurensius Arliman S, Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2019, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking, Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, 2018,
<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162>.

Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018,
<https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017,
<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.

Laurensius Arliman S, Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak, Veritas et Justitia, Volume 3, Nomor 1, 2017,
<https://doi.org/10.25123/vej.2528>.

Laurensius Arliman S, Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 3, 2015, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.

Laurensius Arliman S, Peran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen Yang Menjamin Berita Yang Layak Bagi Perlindungan Anak, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972>.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019,

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang, Jurnal Ijtihad, Volume 31, Nomor 2, 2015, <http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v31i2.63>,

Laurensius Arliman S, Yulfasni, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Laurensius Arliman S, Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya, Dialogica Jurnalica, Volume 9, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.976>.

Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).

Laurensius Arliman S, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Kejaksaan, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Justicia et Pax, Volume 34, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1652>.

Laurensius Arliman S, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional, Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18>.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Justitia et Pax, Volume 32, Nomor 2, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Sudbit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.

Laurensius Arliman S, Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>.

Laurensius Arliman S, Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara, Respublica, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1453>.

Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228>.

Laurensius Arliman S, Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk

Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan, Syiar Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857>.

Laurensius Arliman S, Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, 2017, <http://dx.doi.org/10.35706/positum.v1i2.846>.

Laurensius Arliman S, Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.131>.

Laurensius Arliman S, Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Justicia et Pax, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.25123/vej.2076>.

Laurensius Arliman S, Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Laurensius Arliman S, Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet? Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Volume 2, Nomor 1, 2016,

<https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638>.

Laurensius Arliman S, Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Doctrinal, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015.

Laurensius Arliman S, Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Laurensius Arliman S, Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Laurensius Arliman S, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris, Jurnal Respublica, Volume 16, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1427>.

Laurensius Arliman S, Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau GBHN sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan, Jurnal Manajemen Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak, Istimbath, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Penyelenggaraan Sistem Presidensial Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Jurnal Muhakamah, Volume 4, Nomor 2, 2019.

Melki, Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3385.

Muhammad Afif, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714.

Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.

Muhamad Rasyad, Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3569.

Muhammad Taufiqurrahman, Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Executive Preview, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4341.

Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2,

10.22216/soumlaw.v2i2.4420.

Oky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II

Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019,

10.22216/soumlaw.v2i1.3554.

Rahmat Fauzi, Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status

Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1,

Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3395.

Rahmat Fauzi, Faisal, Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di

Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017),

Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3722.

Rahmat Riardo, Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program

Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok, Soumatera Law Review, Volume

2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.

Rianda Prima Putri, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara

Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi, Soumatera Law Review, Volume 1,

Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.

Ridwan Putra, Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018,

10.22216/soumlaw.v1i2.3529.

Rustan Sinaga, Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas

IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan

Kerja, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018,

10.22216/soumlaw.v1i2.3528.

Ratih Agustin Wulandari, Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari

Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance, Soumatera Law Review, Volume 2,

Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3568.

Rusmilawati Windari, Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization), Soumatera Law Review,

Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4369.

Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, Soumatera Law Review,

Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.

Sandra Dewi, Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum

Perusahaan, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018,

10.22216/soumlaw.v1i2.3744.

Tommy Busnarma, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang,

Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.

Wahyudi, Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit,

Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4484.

Yasmirah Mandasari, Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk

Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi, Soumatera Law Review,

Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.

PETUNJUK MEMBUAT MAKALAH

Yohanis, Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang

(Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan

Pelaksanaanya), Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018,

10.22216/soumlaw.v1i1.3403.